

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Masyarakat atau biasanya disingkat dengan Humas, yang mempunyai pengertian yaitu, salah satu bagian dalam perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan masyarakat, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan DPRD Kabupaten Bantul selalu menjadi sorotan publik maka dari itu dibutuhkan publikasi agar masyarakat mengetahui semua yang berkaitan dengan anggota dewan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara dan hambatan dalam membina *media relations* yang dilakukan bagian humas pada sekretariat DPRD Kabupaten Bantul

A. **Aktivitas Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam Membangun *Media Relations***

Hubungan masyarakat atau yang disebut juga *Public Relations* merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat terpisah dari sistem manajemen dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan, Humas dalam upaya menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi dengan publiknya tersebut dapat menentukan sukses tidaknya usaha organisasi dalam upaya meraih citra positif.

Dengan kata lain, Humas berperan sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi-informasi mengenai keadaan suatu organisasi yang dianggap penting dan patut diketahui para pihak *stakeholder* atau publik. Setiap instansi pemerintah, baik yang berskala besar, menengah ataupun kecil tidak terlepas

dari kegiatan yang berhubungan dengan hubungan timbal balik antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam menghadapi setiap permasalahan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap organisasi instansi pasti membutuhkan bagian yang dapat menjalankan aktivitas yang menghubungkan lembaga / instansi dengan para publiknya.

Dari penyampaian di atas pemahaman Humas DPRD Kabupaten Bantul terhadap *media relations* cukup penting. Sebagai organisasi pemerintah maka Humas DPRD perlu mendalami dan mengetahui pentingnya *media relations* bagi publistias DPRD. Berikut adalah aktivitas Humas DPRD dalam kaitannya dengan penyelenggaraan *media relations* dan publikasinya:

1. Aktivitas Humas dalam Mengelola Publikasi dan Informasi DPRD

Pada dasarnya aktivitas humas DPRD Kabupaten Bantul sudah diupayakan untuk berjalan dengan semestinya. Peneliti mulai menelusuri kinerja Humas di kantor ini dengan melakukan wawancara dengan dengan beberapa informan terkait. Pada bagian ini peneliti memaparkan mengenai aktivitas humas secara umum. Adapun aktivitas Humas DPRD diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Press Conference*

Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh pemimpin rapat, sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari wartawan yang diundang.

Jumpa pers sebelum kegiatan berfungsi sebagai wahana publikasi kegiatan kegiatan yang akan berlangsung. Dalam acara ini pihak penyelenggara jumpa pers ini menyediakan bahan tertulis sehingga kalangan pers memiliki data yang akurat dari materi yang di jumpaperskan.

Sebelum dilaksanakan *press conference* bagian Humas mempersiapkan acara tersebut baik pra pelaksanaan, pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan konferensi pers. *Press Conference* yang dilakukan Humas DPRD Bantul pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tempat : Ruang *Media Center* DPRD Kabupaten Bantul

Waktu : Sewaktu-waktu (karena dianggap ada kebijakan yang dianggap penting). Dilakukan umumnya jam 11.00 sampai selesai.

Narasumber : Ketua DPRD sebagai juru bicara atau anggota DPRD yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD

Peserta : Wartawan peliput berita wilayah Bantul baik media cetak, media elektronik an media online.

Fasilitator : Bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul c/q staf Humas subbidang publikasi. Bertugas mempersiapkan ruangan, perlengkapan dan bahan *press conference*.

Jumpa pers (*press conference*) bisa dilakukan pada saat kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting atau besar itu selesai dilaksanakan. Misalnya anggota DPRD melakukan jumpa pers setelah selesai dalam

melakukan temuan di lapangan dalam sidang. Begitu pun bagian Humas dalam mempublikasikan hasil temuan dewan selalu dilakukan setelah acara dilakukan.

b. *Press Release*

Press release sendiri adalah suatu pernyataan sederhana yang akan dipersiapkan untuk media massa. *Press release* biasanya dibuat oleh Fraksi ataupun Komisi DPRD Kabupaten Bantul menyikapi suatu kondisi/keadaan yang sedang menjadi permasalahan masyarakat. Adapun pelaksanaan *press release* dilakukan pada:

Tempat : Tidak menggunakan tempat khusus.

Waktu : Setiap saat, diberikan langsung kepada wartawan atau dikirimkan ke media mitra DPRD.

Narasumber : Ketua DPRD atau anggota DPRD yang ditunjuk oleh yang ingin menyampaikan pendapat.

Peserta : Wartawan peliput berita wilayah Bantul baik media cetak, media elektronik an media online.

Fasilitator : Staf subbagian bantuan Fraksi dan Komisi dalam memperbanyak releese kepada media.

Berikut salah satu *press release* yang disampaikan kebebrapa media oleh Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul terkait dengan audiensi dari HTI (Hizbut Tahrir Indonesia):

Kepada Yth:

Pimpinan Media Cetak/Media Elektronik

Pewarta Kab. Bantul

Press Release !!!

Anggota DPRD Bantul Setuju

Selamatkan Keluarga Muslim dengan Islam

Bersamaan dengan ramainya jalan raya Bantul karena apel pagi Hari Kebangkitan Nasional pada Senin (20/5/2013), delegasi dari Muslimah HTI DPD II HTI Kabupaten Bantul diterima oleh Komisi D, DPRD Kabupaten Bantul. Delegasi dipimpin Titin Erliyanti, S.Pd. (Pengurus MHTI Bantul) yang didampingi suami, ditemui oleh Bapak Sarinto (Fraksi PAN) selaku ketua Komisi D bersama Bapak Jupriyanto, S.Si (Fraksi PKS) selaku wakil ketua Komisi D dengan bidang tugas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, sosial, kepemudaan, olahraga, peranan wanita, keluarga berencana, agama, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Selengkapnya press release di atas dapat dilihat pada lembar lampiran penelitian ini.

c. *Press Tour*

Kunjungan pers atau *press tour*. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang besar baik swasta maupun pemerintahan. *Press tour* yaitu kegiatan tour perusahaan dengan mengikutsertakan wartawan. *Press tour* ini diantaranya melalui kunjungan kerja ketempat-tempat yang ada kaitannya dengan bidang kerja perusahaan

Tempat : Luar kota atau luar daerah yang tempatnya ditentukan dalam rapat Bagian Humas

Waktu : Dilaksanakan umumnya pada masa anggota PRD sedang dalam masa reses (masa tidak bersidang).
Dan jadwal liputan wartawan tidak padat.

Narasumber : Sekretaris DPRD/Kabag. Humas DPRD

Peserta : Wartawan peliput berita wilayah Bantul baik media cetak, media elektronik an media online.

Fasilitator : Bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul c/q staf Humas subbidang publikasi dan dokumentasi.
Bertugas mempersiapkan acara, perlengkapan, akomodasi, transportasi dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat tabel frekuensi kegiatan *media relations* yang dilakukan Bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di bawah ini :

Tabel 3.1.Frekuensi *Media Relation*
Humas DPRD Bantul Tahun 2012-2013

Kegiatan	Tahun		Jumlah Frekuensi
	2012	2013 (s/d Agustus)	
<i>Press Conference</i>	7	6	13
<i>Press Release</i>	15	9	24
<i>Press Tour</i>	1	1	2

m

Sumber : Humas DPRD Bantul, 2013.

Adapun detail perincian kegiatan *media relations* Humas DPRD

Kabupaten Bantul adalah :

Tabel 3.2. Kegiatan *Media Relations*
Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2012

Bulan	Kegiatan <i>Media Relations</i>		
	<i>Materi Press Conference</i>	<i>Materi Press Release</i>	<i>Press Tour</i>
Januari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Coference</i> Pembukaan masa sidang tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Badan Legislasi tentang pembahasan tentang prolegda 2012 ▪ Release Badan Musyawarah tentang agenda sidang Tahun 2012 	-
Pebruari	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi C tentang pembangunan menara komunikasi 	-
Maret	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi B tentang pengelolaan pertanian di lahan pasir SG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Tour</i> ke kota Malang
April	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi D tentang UN SMP/SMA 	-
Mei	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Coference</i> Penetapan KUA dan PPAS tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi A tentang penataan kepegawaian 	-
Juni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Coference</i> Perhitungan APBD 2011 	-	-
Juli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Coference</i> Catatan semester pertama tahun sidang 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi D tentang Himbauan Pengelola Hiburan pada bulan Ramadhan 	-
Agustus	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi 	-

		<p>B tentang Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Realease pimwan menyambut HUT RI ke 67 	
September	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Coference</i> Pembahasan APBD tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Pimpinan Dewan (pimwan) tentang pembahasan RAPBD tahun 2013 ▪ Release Komisi A tentang penertiban PKL di pantai Parangtritis 	-
Oktober	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi B dan C tentang penataan pasar modern 	-
November	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Badan Legislasi tentang pembahasan Raperda menjadi Perda tahun 2012 	-
Desember	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Coference</i> Pengesahan APBD tahun 2013 ▪ <i>Press Coference</i> Penutupan masa sidang tahun 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Badan Kehormatan Dewan (BKD) tentang catatan-catatan kinerja Anggota DPRD tahun 2012 ▪ Release pimwan tentang catatan akhir tahun sidang 2012 	-

Sumber : Humas DPRD Bantul, 2013

Tabel 3.3. Kegiatan *Media Relations*
Humas DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2013

Bulan	Kegiatan <i>Media Relations</i>		
	<i>Press Conference</i>	<i>Press Release</i>	<i>Press Tour</i>
Januari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Conference</i> Pembukaan masa sidang tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Badan Legislasi tentang pembahasan tentang prolegda 2013 ▪ Release Badan Musyawarah tentang agenda sidang Tahun 2013 	-
Pebruari	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi B tentang pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Tour</i> ke Bandung, Jawa Barat
Maret	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Conference</i> Hasil Musrenbang 2013 dan persiapan pembahasan KUA 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi C tentang pembangunan jembatan Plumbon-Balerejo Banguntapan 	-
April	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Conference</i> mensikapi DCS Anggota DPRD tahun 2014-2019 oleh KPUD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi D tentang UN SMP/SMA 	-
Mei	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Conference</i> Penetapan KUA dan PPAS tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi D tentang Keluarga Muslim 	-
Juni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Conference</i> Perhitungan APBD 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Pimwan mensikapi kenaikan BBM 	-
Juli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Press Conference</i> Catatan semester pertama tahun sidang 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Release Komisi A tentang pendataan kependudukan berkaitan dengan e-KTP 	-
Agustus	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realease pimwan 	-

		menyambut HUT RI ke 68	
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber : Humas DPRD Bantul, 2013

Nara sumber yang dihadirkan baik dalam *press conference*, *press release* ataupun *press tour* selalu dilakukan oleh Ketua DPRD/Pimpinan Dewan atau anggota DPRD, karena dalam Tata Tertib DPRD Ketua DPRD adalah juru bicara dari lembaga legislatif, sedangkan anggota memiliki hak besuara dan menyampaikan pendapat seperti tercantum dalam Undang Undang yang mengatur hak-hak anggota dewan (Undang Undang MD3 – MPR, DPR, DPD dan DPRD). Seperti terlihat dalam Pasal 349 ayat (4) Undang Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pola kelola humas di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul sebenarnya telah mencoba membangun iklim professional, diantaranya adalah dengan adanya pembagian tugas dalam struktur Humas itu sendiri.

“Kami juga di Humas itu membagi tugas masing-masing. Ada yang menerima aspirasi, ada yang mengkliping, ada yang mengagendakan kegiatan, ada yang bertugas untuk izin-izin kerja dan magang, ada juga yang mendampingi dewan” (Wawancara dengan Kwintarto Heru Prabowo ,18 Maret 2013).

Pernyataan diatas disampaikan Kabag Humas dan Hukum sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Pembagian tugas tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja kehumasan pada tiap bagian. Pembagian kerja tersebut bahkan terlihat sangat spesifik untuk beberapa pekerjaan yang terbilang tidak terlalu rumit juga ditempati oleh satu staf. Tidak banyak staf yang mengurus dua pekerjaan sekaligus.

“Pada bagian humas, ada beberapa tupoksi masing-masing. Tiap staf diberi uraian kerja. Contohnya saya diberi tugas administrasi mengontrol pemberitaan koran.” (Wawancara dengan Noviyanti, SST 18 Maret 2013)

Diungkapkan pula oleh Ervianto salah satu staf humas tentang aktivitas yang dijalani : “Pekerjaan saya mengumpulkan berita dalam bentuk kliping, kemudian dibagikan ke DPRD” (Wawancara dengan Erviandi, 18 Maret 2013).

Pembagian kinerja yang sangat spesifik ini memungkinkan kinerja Humas dikantor ini menjadi maksimal dikarenakan pekerjaan yang tidak terlalu banyak. Pola pembagian kinerja seperti ini peneliti dapatkan sudah dilakukan dalam selang waktu yang sudah sangat lama. Artinya pola ini telah mejadi budaya kehumasan di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Kelebihan budaya pembagian kinerja ini bagi staf Humas diantaranya tidak diperlukannya waktu yang sangat lama untuk penyesuaian kinerja bagi staf yang baru. Selain itu kinerja akan lebih gampang terpantau.

Namun terlepas dari itu budaya turun temurun di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul ini juga memiliki kekurangan. Terkadang urusan-urusan tersebut membuat para staf menjadi tidak inovatif dan menumpulkan

kreativitas untuk menciptakan hal-hal yang baru. Konteks dan kebutuhan organisasi maupun masyarakat yang berubah-ubah pastinya menuntut kreativitas sebuah instansi kehumasan pemerintah.

“Saya menyebut ini sebagai penyakit akut birokrasi. Enggan untuk belajar. Lingkungan ini berubah, tapi kapasitas tidak meningkat. Kehumasan ini kehumasan Konvensional. Di tengah era saat ini, sebuah organisasi yang bisa bertahan adalah organisasi yang senantiasa belajar. Harus ada inovasi, kreativitas, dan membandingkan pembelajaran dengan orang lain”. (Wawancara dengan Sadju, S.Pd. tanggal 19 Maret 2013).

Pernyataan salah satu anggota legislatif diatas merupakan bentuk ungkapan tentang kebiasaan organisasi yang kemudian menjadikan hilangnya inovasi termasuk terkait masalah kehumasan. Pembagian tugas yang sangat spesifik dan cenderung kaku tersebut membuat peneliti mencoba mengetahui apakah tugas tersebut telah diketahui oleh staf dan akhirnya pertanyaan diarahkan menuju tupoksi humas itu sendiri di lembaga pemerintahan. Pada dasarnya humas di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul ini selalu diberi panduan pelaksanaan tugas. Setiap saat panduan pelaksanaan tugas diberikan untuk memberi kejelasan dan batasan wilayah kerja masing-masing staf.

Dikemukakan oleh . Noviyanti, SST :

“Humas itu setiap saat diberi uraian tugas. Ada yang menangani koran, kliping, iklan” (Wawancara dengan Noviyanti, SST 18 Maret 2013)

Inilah yang menjadi penyebab kreatifitas staf Humas dalam menjalankan fungsinya menjadi terkekang. Uraian tugas yang sudah sangat lama tidak diperbaharui mendukung hal itu. Selain itu budaya organisasi pemerintahan yang menjadikan pimpinan sebagai “raja” dalam sebuah institusi semakin mendukung macetnya sebuah inovasi baru untuk bermunculan. Mengenai

fungsi dan tugas Humas itu sendiri, peneliti mencoba untuk menggali apa tupoksi yang ada senantiasa berjalan di bagian ini.

“Membantu tugas-tugas pimpinan, membantu tugas-tugas dewan. Menjembatani masyarakat, arti kata kami yang pertama menerima mereka sebelum sampai kepada dewan. Merangkum semua pemberitaan di media dalam bentuk kliping oleh yang punya bagian”. (Wawancara dengan Drs Helmi Djamharis, MM tanggal 19 Maret 2013)

Ujaran tersebut menggambarkan tupoksi Sekretariat Dewan dan Humas di kantor ini. Uraian tersebut sebenarnya semua telah tercantum. Berikut tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau dalam perusahaan lebih dikenal dengan *job description*, adalah:

Secara umum tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul pada Bab III Pasal 5 dan 6 sebagai berikut:

- 1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- 2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris, secara teknis operational berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam membangun *media relations*, Humas DPRD Kabupaten Bantul melaksanakannya menjaga, menjalin dan membina hubungan baik dengan media. memang bukan sesuatu hal yang mudah. Secara sederhana bisa diilustrasikan bahwasanya menjalin hubungan baik dengan media ini seperti

halnya kita menjalin hubungan dengan pasangan. Sangat kompleks dan banyak hal yang musti diperhatikan. Dengan demikian Humas DPRD mempercayakan hal ini kepada orang yang memang memiliki selain *network* ke media juga kedekatan hubungan dengan masing-masing media termasuk memahami secara baik seluk-beluk media massa.

Berikut ini adalah tabel uraian tugas/*job description* pimpinan dan staf dari bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul, adalah:

Tabel 3.4. *Job Description* Humas DPRD Kabupaten Bantul

Nama	Jabatan	<i>Job Description</i>
Kwintarto Heru Prabowo, S.sos	Kabag Humas dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memimpin bagian Humas dan Hukum DPRD ▪ Mewakili rapat-rapat Sekretariat DPRD dengan DPRD ▪ Menyusun Agenda humas DPRD ▪ Penanggungjawab staf informasi dan dokumentasi
Noviyanti, SST	Kasie Humas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jurubicara DPRD ▪ Layanan publikasi dengan media massa ▪ Pendamping pimpinan DPRD pada kegiatan kunker ▪ Menerima tamu dari pejabat eksekutif/kunjungan dari DPRD lain ▪ Penanggungjawab staf Publikasi dan Protokoler
Erviani	Staf Informasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan bahan dan penyebarluasan pemberitaan kegiatan DPRD ▪ Pengembangan dan layanan informasi DPRD
Nugroho	Staf Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan dan penyaluran usul/pendapat masyarakat ▪ Kemitraan dengan media

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ massa ▪ Publikasinya profil DPRD, kegiatan dan kebijakan DPRD melalui penerbitan berkala
Sumarno	Staf Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD ▪ Fotografi dan recording acara DPRD
Munaji	Staf Protokoler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MC Rapat paripurna ▪ MC acara DPRD ▪ Penyiapan sarana protokoler
Krisvianti	Staf Protokoler	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan DPRD ▪ Penerimaan dan penyerapan aspirasi masyarakat ▪ MC rapat-rapat DPRD

Sumber : Humas DPRD Bantul, 2013

2. **Aktivitas Humas DPRD dalam membangun *Media Relations***

Peneliti memasuki bagian penjabaran tentang aktivitas Humas sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam membangun *media relations* sebagaimana disampaikan pada bab II, fungsi ini dalam sebuah instansi pemerintah terbagi dua. Ada yang bersifat ke dalam dan ada yang bersifat keluar. Beberapa anggota DPRD Kabupaten Bantul berujar mengenai fungsi ini dan diantara peran itu nampak ketika anggota DPRD menjalankan reses atau ada pembawa aspirasi oleh masyarakat itu sendiri dalam bentuk demonstrasi yang datang langsung ke kantor DPRD Kabupaten Bantul.

“Contoh kasus demo. Kami adalah jembatan ke dewan, kami memediasi mereka ketemu dewan. Setelah mereka diterima kami buat rilisnya”.(Wawancara dengan Drs Helmi Djamharis, MM tanggal 18 Maret 2013)

Memang dari sekian banyak urusan mediasi yang bisa dilakukan, humas sekretariat DPRD Kabupaten Bantul hanya membatasi urusan memenuhi tuntutan aspirasi pengunjung rasa atau kru media massa yang datang ke kantor. Tidak ada pengklasifikasian publik yang peneliti dapatkan seperti yang terjabarkan format tata kelola kehumasan pemerintah. Ini dibuktikan dengan seluruh staf yang peneliti temui menganggap mediasi secara sempit, sekedar berurusan dengan demonstran.

“Sebagai fungsi mediator dan publisitas, yang sudah saya kerjakan misalnya memediasi wartawan, menerima demonstran. Terkadang para pengunjung rasa tidak mengetahui aturan. Biasanya kita ajak dia ke ruang media center kemudian menjelaskan (maksud kedatangan)”. (Wawancara dengan Mubarak, wartawan, tanggal 18 Maret 2013)

Menghadapi urusan demonstrasi menurut Humas mereka telah melakukan prosedur penanganan berikut adalah tahap penanganan demonstrasi yang berhasil peneliti simpulkan yaitu, Tahap penerimaan, tahap ini menurut staf humas ialah tahap menerima para pengunjung rasa yang biasa dilakukan di halaman kantor dewan. Bila yang melakukan aspirasi sudah merupakan kedatangan yang kedua kalinya dan telah membuat perjanjian dengan humas maka biasanya para pengunjung rasa sudah tidak melewati tahap ini. Pada tahap ini pula humas akan mempertanyakan mengenai maksud dan tujuan kedatangan. Terkadang pula Humas meminta selebaran yang biasanya sudah disiapkan oleh para pengunjung rasa. Diungkapkan oleh Taufik selaku salah satu staf Humas“. Biasanya kita terima dulu terus kita ambil pernyataan sikapnya”.

Tahap pemanggilan perwakilan massa, negosiasi berlangsung dan biasanya humas meminta beberapa orang dari massa untuk masuk ke ruang

aspirasi. Para pengunjung rasa terkadang sudah menyiapkan negosiator yang akan masuk berhadapan langsung dengan anggota dewan yang dituju.

“Tidak pernah terjadi seperti itu. Selama demo disini tidak pernah terjadi seperti itu. Itu bukan demo mereka diundang (kedua kalinya). Kalau ada demo pasti lewat humas, karena prosedurnya seperti itu”. (Wawancara dengan Drs Helmi Djamharis, MM tanggal 19 Maret 2013)

Tahap penyampaian kepada anggota legislatif terkait, hasil dari negosiasi yang dilakukan dengan para pembawa aspirasi kemudian disampaikan kepada anggota dewan yang sedang berada di tempat, tentunya dengan melihat pula keterkaitan masalah yang dibawa oleh pembawa aspirasi. Tahap publikasi, kru media yang juga datang ke lokasi biasanya berada di ruangan media center yang telah disediakan khusus untuk kru wartawan. Disini pihak humas telah menyediakan rilis dari aksi unjuk rasa yang kemudian disampaikan kepada kru media massa. Dikemukakan oleh Amir Syarifuddin

“Untuk media bahkan ada ruangan disiapkan untuk wartawan”.

Menurut salah satu anggota legislatif, kantor DPRD Kabupaten Bantul telah menyediakan banyak fasilitas untuk mendukung peran-peran Humas sebagai mediator hingga publisitas, diantaranya dengan penyediaan ruangan penerimaan aspirasi yang tepat berada di bagian depan gedung serta ruangan media center untuk para wartawan yang juga biasa digunakan untuk *press conference*.

Sebelum masuk pada pembahasan lebih dalam mengenai apakah aktivitas Humas berjalan dengan baik atau tidak peneliti akan lebih dulu membahas tentang bagaimana publisitas berjalan di kantor ini. Penyediaan ruang *media*

center di kantor DPRD Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan media massa. Beberapa kegiatan publisitas yang melibatkan media massa hanya berupa pemberian rilis. Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa bagaimana hubungan itu terbangun dengan baik. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa :

“Media itu mendukung, setelah ada putusan itu diambil oleh media. Supaya masyarakat semua itu”. (Wawancara dengan Amir Syarifuddin, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, 23 Maret, 2013)

Beberapa kegiatan dewan yang dipublikasikan antara lain berupa hasil-hasil pertemuan dan beberapa kunjungan kerja ataupun reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bantul. Selain itu hasil dari setiap kedatangan para pembawa aspirasi sering dipublikasikan melalui media massa. Drs. Helmi Djamharis, MM menyatakan :

“Dibuatkan hasil pertemuan tersebut kemudian kami lempar ke masyarakat”. (Wawancara dengan Drs. Helmi Djamharis, MM tanggal 19 Maret 2013)

Sedikitnya paparan mengenai aktivitas Humas DPRD Kabupaten Bantul membuktikan kurangnya kreatifitas Humas. Pemaparan ini membuktikan bahwa maksimalisasi kerja Humas terbelang jauh dari harapan. Selain publisitas dan menjalankan fungsi mediator, Humas juga menjalankan beberapa tugas yang memudahkan kinerja-kinerja anggota DPRD diantaranya menemani langsung anggota DPRD yang melakukan reses atau menyiapkan beberapa kelengkapan informasi rapat.

“Tetap berhubungan dengan masyarakat. Kalau anggota dewan butuh seperti catatan-catatan, kita memberikan informasi yg anggota dewan butuhkan”. (Wawancara dengan Noviyanti, SST tanggal 18 Maret 2013).

Drs. Helmi Djamharis, MM menyatakan : “Kami hanya sebatas ikut saja. Terkadang dari kegiatan Humas mendampingi anggota DPRD cenderung hanya sekedar ikut. Mereka tidak sekaligus menjalankan fungsi Humasnya” (Wawancara dengan sekretaris DPRD tanggal 19 Maret 2013).

Berikut adalah agenda kegiatan bagian Subbag Humas DPRD Kabupaten Bantul Bulan Juli 2012 hingga Juni 2013 :

Tabel 3.5. Kegiatan Humas DPRD Kabupaten Bantul Juli 2012 - Juni 2013

Tahun 2012					
Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan bulletin Biwara ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain ▪ Stand Bantul Expo 2012 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acara utak-atik Radio Persatuan Bantul ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Pendampingan penyerapan aspirasi anggota DPRD ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan bulletin Biwara ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain ▪ Pendampingan kunker DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acara utak-atik Radio Persatuan Bantul ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan bulletin Biwara ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acara utak-atik Radio Persatuan Bantul ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Pendampingan penyerapan aspirasi anggota DPRD ▪ Press confrecee akhir tahun ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain
Tahun 2013					
Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan bulletin Biwara ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acara utak-atik Radio Persatuan Bantul ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain ▪ Pendampingan kunker DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan bulletin Biwara ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acara utak-atik Radio Persatuan Bantul ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Pendampingan penyerapan aspirasi anggota DPRD ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan bulletin Biwara ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acara utak-atik Radio Persatuan Bantul ▪ Acara Garduprojo Tamansari – Jogja TV ▪ Penerimaan kunjungan eksekutif/DPRD lain ▪ Stand Bantul Expo 2013 ▪ Pendampingan kunker DPRD

Sumber : Humas DPRD Bantul, 2013

Fakta yang terjadi dilapangan, baik *media relations officer* (staf humas) dalam membangun dan membina *media relations* menjalankan fungsinya lebih dari sekedar menjalin dan menjaga hubungan baik kepada para wartawan (media) dengan berusaha secara aktif memenuhi kebutuhannya akan informasi guna mendapatkan publisitas bagi media tempat jurnalis bekerja. Seorang staf humas yang bertindak sebagai *media relations officer* DPRD juga harus menjalankan fungsinya dalam mempersiapkan, mengatur dan menyelenggarakan event (*press conference / editor gathering / press tour* dan lainnya) yang ada terkait dengan pemberitaan dari kalangan anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Di tingkatan ini, *media relations* setelah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam management hingga membuat sebuah *report* dari kegiatan publisitas tersebut kemudian menyerahkannya ke public relation officer dalam hal ini adalah Kabag Humas DPRD yang selanjutnya dibahas di tingkat pimpinan DPRD dan sekretaris DPRD. Hasil dari kegiatan ini kemudian bisa digunakan sebagai masukan maupun bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan DPRD selanjutnya.

Seorang staf humas DPRD Kabupaten Bantul yang bertindak sebagai *media relations officer* kemudian kembali menjalankan fungsinya dalam berusaha menjalin dan membina hubungan baik dengan media termasuk menindak lanjuti program publisitas yang diselenggarakan. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan setelah event berlangsung yang bertujuan untuk tetap menginformasikan *progress* dari kegiatan yang telah dijalankan. Misalkan

acara tersebut adalah acara *press conference* dalam rangka paparan kepada publik yang berupa kebijakan daerah seperti Penetapan Perda, Penetapan APBD dan kebijakan strategis lainnya. *Press conference* biasanya dilakukan di ruang media center di gedung DPRD atau di ruang Ketua DPRD. Narasumber utamanya adalah Ketua DPRD sebagai juru bicara. Namun tidak menutup Ketua Komisi atau Ketua Badan dapat menyampaikan *press confrence* kepada media. Salah satu *press conference* yang pernah dilakukan Humas DPRD Kabupaten Bantul adalah ketika *launching* website DPRD Kabupaten Bantul tahun 2011 lalu.

Terkait dengan frekuensi *press conference* tidak terikat kuantitasnya. *Press conference* yang dilakukan DPRD Kabupaten Bantul umumnya dilakukan pada awal masa sidang, pembahasn raperda yang bersifat krusial dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah). Seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.6 *Press Conference* DPRD dalam satu Tahun Masa Sidang

No	Jenis Penyampaian	Waktu Pelaksanaan	Nara Sumber
1	Pembukaan Masa Sidang	Januari awal	Ketua DPRD
2	Pembahasan KUA	Pebruari/Maret	Ketuan Banggar
3	Pembahasan raperda-raperda	April	Ketua Banleg/Ketua Komisi
4	Pembahasan PPAS/PPA	April-Juni	Ketua Banggar
5	Pembahsan APBD Perubahan (ABT)	Juli	Ketua/Pimpinan DPRD
6	Pembahasan RAPBD	September	Ketua/Pimpinan DPRD
7	Penetapan RAPBD	November/Desember	Ketua/Pimpinan DPRD
8	Penutupan Masa Sidang	Desember	Ketua DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Bantul, 2013

a. *Press Conference.*

Menurut Kabag. Humas DPRD Bantul Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos. *press conference* adalah yaitu suatu pertemuan khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi yang diselenggarakan oleh Humas DPRD/DPRD (Wawancara dengan Kwintarto Heru Prabowo 18 Maret 2013).

b. *Press Release*

Menurut Kwintarto, *press release* adalah suatu bentuk jumpa pers resmi yang diselenggarakan secara periodik pada awal/akhir bulan atau tahunan oleh pihak humas DPRD/DPRD (Wawancara dengan Kwintarto Heru Prabowo 18 Maret 2013).

c. *Press Tour*

mengajak wartawan dari berbagai media massa yang telah dikenal baik untuk mengikuti perjalanan pejabat atau pimpinan perusahaan ke luar kota selama lebih dari satu hari, untuk meliput secara langsung mengenai perjalanan atau kegiatan yang dilakukan oleh Humas DPRD/DPRD (Wawancara dengan Kwintarto Heru Prabowo 18 Maret 2013).

Pelaksanaan *press conference* tidak selalu dilaksanakan secara tidak terjadwal atau tidak teratur, hal ini disebabkan memang jadwal kegiatan kalangan anggota dewan yang begitu padat akan jadwal rutin maupun kegiatan yang bersifat mendadak seperti pemantauan lapangan (sidak) dan audiensi masyarakat yang sifatnya urgen.

Selain *Press conference*, Humas DPRD juga melakukan *press release*. Pembuat *press release* mesti mengidentifikasi kepada siapa siaran pers tersebut akan disampaikan. Kepada media jenis apa saja siaran press diharapkan dimuat (cetak, online, televisi, majalah dll). Semua identifikasi “peta media” ini akan membuat tujuan pembuatan *press release* lebih mudah tercapai. Karena itu, sebelum membuat *press release*, Humas DPRD Bantul merumuskan masalah yang akan disampaikan, sumber-sumber yang diwawancarai untuk menguatkan isi *press release*, dan data-data yang disampaikan. Sebelum diedarkan isi *press release* mesti dicek berkali-kali, baik isi, data, kalimat per kalimat, istilah-istilah, dan nama narasumber agar tidak terjadi kekeliruan sekecil apa pun.

Secara umum Konferensi Pers adalah pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi atau penjelasan dari topik yang tengah hangat. Biasanya konferensi pers diadakan secara mendadak di tengah suatu kejadian atau keberlangsungan acara tertentu.

1. *Persiapan Press Conference*

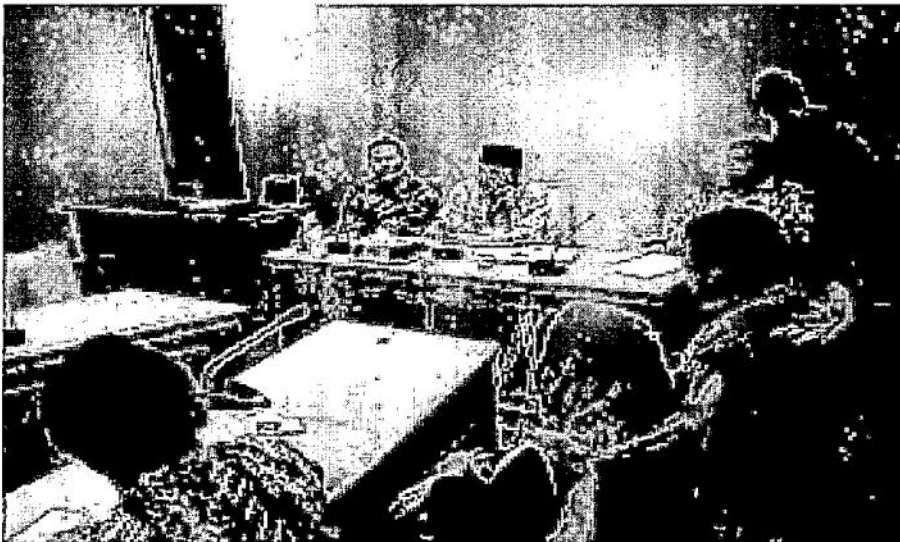
- a. Membuat undangan peliputan, yaitu mengundang media massa untuk meliput acara (menyebutkan apakah undangan ini hanya sekedar undangan peliputan taukah juga undangan untuk menghadiri konferensi pers)
- b. Menyiapkan *news release*, yang berisikan peristiwa yang akan disetting pada saat hari-H.

2. Nara Sumber, pada umumnya nara sumber di DPRD telah ditunjuk sesuai Tata Tertib DPRD seperti Ketua DPRD, Ketua Komisi, Ketua Badan menyelenggarakan konferensi pers:

3. Pelaksanaan *Press Conference* :

Pelaksanaan *Press Conference* diadakan untuk acara yang benar-benar penting selain itu waktunya dengan pasti. Adapun tempat yang terpisah dari tempat berlangsungnya acara). Selain itu Humas juga harus mempersiapkan buku tamu untuk mengecek jumlah wartawan yang hadir dan darimana saja media yang meliput.

Bagian Humas juga menyiapkan media kit bagi wartawan: news release atau press release, pernyataan resmi organisasi, juga dokumentasi dan informasi cetak yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Adapun waktu pelaksanaan *Press Conference* kisaran waktunya antara 15 sampai 30 menit



Gambar. 3.1 Pelaksanaan *Press Conference* Pimpinan Komisi dengan Wartawan *Pewarta Bantul*

Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tujuan mendasar dari humas adalah membangun hubungan dengan publik kunci perusahaan (Ledingham dan Bruning, 1998). Peran pers menjadi penting sebagai Penyambung lidah dalam menyampaikan berita tentang aktivitas perusahaan agar mendapat pengakuan dari publik. Salah satu cara yang dilakukan Humas DPRD agar wartawan/media mampu memberitakan perusahaannya secara menyeluruh dan seimbang tanpa ada yang dilewati.

Humas DPRD juga menyelenggarakan kegiatan dalam *media relations*-nya. Kegiatan itu berupa *press tour*. *press tour* Humas DPRD Kabupaten Bantul 24 Oktober 2011 lalu pernah mengadakan *press tour* ke Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Peserta *press tour* ini adalah pewarta media yang bertugas meliput di Kabupaten Bantul dan staf Humas DPRD Kabupaten Bantul. Acara ini selain sebagai acara refreshing juga sebagai alat untuk mempererat hubungan antara Humas DPRD *dengan* insan pers yang bertugas meliput kegiatan di Kabupaten Bantul.

Sebelum melaksanakan kegiatan *press tour*, bagian Humas DPRD melakukan peninjauan lokasi mana yang dituju, menyusun anggaran biaya dan menentukan peserta yang ikut dalam acara tersebut. Karena anggaran *press tour* sudah dianggarkan tidak ada kesulitan dalam merencanakan acara tersebut. Kendalanya hanya terletak jurnalis yang berangkat harus mendapatkan ijin dari pimpinan media yang bersangkutan. Selain kegiatan *press tour* DPRD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan informal lainnya seperti resepsi *tour*. Selain tidak ada anggaran untuk itu, resepsi *tour* umumnya

dilakukan oleh kalangan DPRD bukan kewenangan sekretariat DPRD dimana bagian Humas ada didalamnya.

Dalam *Press Tour* pelaksanaannya harus benar-benar dipersiapkan secara matang seksama dan teliti, karena menyangkut kredibilitas dari humas itu sendiri. Adapun Humas DPRD dalam acara *press tour* secara umum melakukannya dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Persiapan

- a. Penjajakan lokasi kegiatan *press tour*.
- b. Menyusun anggaran biaya (transportasi, penginapan, logistik dll)
- c. Menentukan jumlah peserta.
- d. Tentukan Tema liputan ; Tentukan Tujuan
- e. Menyiapkan materi pendukung
- f. Menentukan waktu kunjungan
- g. Menentukan petugas pendamping dari Humas
- h. Mengkoordinasikan dengan kantor daerah tujuan
- i. Mempersiapkan transportasi, akomodasi dan konsumsi
- j. Mempersiapkan media kit.

2. Pelaksanaan

- a. Bentuk acara kegiatan yang dilaksanakan dalam *press tour* (*gethering*, wisata dll)
- b. Pengisi acara, dan agenda acara *press tour*.
- c. Penghargaan (*reward*) pada jurnalis peliput kegiatan di DPRD.

- d. Pemberian kenang-kenangan (*souvenir*) pada media yang bekerja sama dengan Humas DPRD
- e. Membuat evaluasi perjalanan
- f. Membuat evaluasi pemberitaan
- g. Membuat laporan perjalanan



Gambar. 3.2. Kegiatan *Press Tour* Humas DPRD Kabupaten Bantul bersama Wartawan peliput pemberitaan Bantul

Mengenai jumlah peserta yang diundang dalam press tour, menurut bagian Humas DPRD Bantul berjumlah 32 jurnalis dari 30 media cetak maupun elektronik. Semua jurnalis yang tercatat di bagian humas akan diberi undangan untuk mengikuti acara tersebut. Namun kenyataannya biasanya yang mengikuti kegiatan tersebut berkisar 20 sampai 25 jurnalis. Alasannya atau pertimbangannya biasanya tidak mendapatkan ijin dari pimpinan redaksi. Banyaknya tugas yang harus diliput oleh jurnalis dan lain sebagainya. Sehingga untuk jumlah tidak dapat ditentukan setiap tahunnya.

Tabel 37, Kegiatan *Media Relations*

Perihal	Waktu dan Tempat	Hal yang Disampaikan
<i>Press Conference</i>	Waktu: Lihat Tabel 3.6. tempat: Menyesuaikan (Media Center, Bantul Terrace dsb)	Kebijakan-kebijakan DPRD terkait masa sidang, pembahasan KUA, PPA, pembahasan RAPBD, perubahan anggaran, penutupan masa sidang dll
<i>Press Release</i>	Waktu : Bila diperlukan Tempat: Media Center DPRD	Terkait kebijakan DPRD, Kegiatan Komisi-komis, Banggar dan Banleg
<i>Press Tour</i>	Tempat/Tujuan : Malang Waktu : 24 Oktober 2011	Evaluasi pelaksanaan <i>media relations</i> Humas DPRD Bantul, refreshing

Sumber : Humas DPRD Kab. Bantul, 2013.

B. Faktor-faktor Yang Mendukung dan Menghambat Aktivitas Humas

DPRD Kabupaten Bantul Dalam Membangun *Media Relations*

Pentingnya peran Humas di DPRD Kabupaten Bantul dirasakan sangat penting dalam membangun citra positif institusi. Selain itu urusan yang padat membutuhkan kinerja yang sangat maksimal. Untuk mendukung kinerja-kinerja DPRD Kabupaten Bantul maka humas sangat diharapkan mampu memenuhi hal tersebut. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan dan tuduhan mengenai kinerja yang tidak terlalu baik ketika berhubungan secara vertikal dengan masyarakat.

Upaya maksimalisasi aktivitas kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakanpula oleh DPRD Kabupaten Bantul, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas DPRD

Kabupaten Bantul selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Beberapa waktu yang lalu media Tribun Jogja telah mengeluarkan ulasan mengenai peran Humas DPRD Kabupaten Bantul yang belum terlalu maksimal atau bahkan oleh beberapa kalangan dianggap tidak berjalan. Pada sub bab sebelumnya peneliti telah menguraikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Humas menurut bagian Humas itu sendiri dan dibenarkan oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Namun sebelum masuk pada pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja Humas, peneliti akan mengurai tanggapan Humas tentang pelaksanaan fungsinya.

“Kasubag humas dan staf sudah menjalankan tugasnya selaku mediator dan fasilitator, kalau anggota dewan itu sudah turun ke lapangan kasubag humas itu berserta stafnya langsung turun ke lapangan. Demikian pula berkoordinasi dengan media cetak maupun media elektronik”. (Wawancara dengan Sekretaris Dewan, tanggal 19 Maret 2013).

Pandangan ini dapat dikatakan sangat subjektif dan terlalu menggeneralisir hasil dari kinerja Humas. Memang beberapa anggota legislatif mengakui bahwa kinerja Humas telah berhasil namun yang diutarakan lebih bersifat ke dalam dan itu hanya pandangan dari apa yang dilihat dari komisinya sendiri.

“Humas memformulasi. Hampir tidak ada kendala. Karena semua staf sudah berfungsi dengan baik”. Bisa lewat telepon bisa lewat sms, bisa lewat partai masing-masing. Semua sangat mendukung. Saya didukung punya sekretaris erwi yang lihai”. (Wawancara dengan Noviyanti, SST tanggal 18 Maret 2013).

Pernyataan diatas terbaca sangat sempit dalam menila kinerja Humas. Bisa diindikasikan bahwa kinerja Humas secara ke dalam (internal) memang telah berjalan walaupun hanya pada beberapa komisi tertentu.

“Saya lihat humas itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada rapat komisi, itu langsung mendapatkan informasi dari humas. Humas itu sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ketika ada aspirasi. Demo atau apa”. (Wawancara dengan Amir Syarifuddin tanggal 20 Maret 2013).

Padahal yang harus diketahui bahwa sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal. Secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan stakeholder baik di luar maupun di dalam. Jadi Humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, sangat membutuhkan dukungan publik.

Inilah yang kemudian janggal dari peran Humas DPRD Kabupaten Bantul secara ke dalam memang sudah terlihat berjalan, namun secara ke luar hal itu belum bisa dibuktikan. Humas DPRD Kabupaten Bantul seharusnya juga berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu aktivitas Humas sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang belum terlihat adalah belum terbinanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat dalam membina martabat instansi dalam

pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Beberapa anggota legislatif juga menilai kinerja buruk Humas. Para anggota legislatif ini sudah paham betul mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh Humas itu sendiri.

“Rata-rata humas di pemerintahan baik legislatif, eksekutif, yudikatif itu tidak terlalu maksimal soal kehumasannya. Pengertian dari humas itu hubungan masyarakat, berkaitan dengan humas tentu banyak sector. Banyak aktivitas lain mau diurus”. “Tapi kelihatannya humas hanya mengurus media-media saja. Mulai dari pemberitaan dan segala macam. Sangat jarang mau bersentuhan dengan kepentingan masyarakat baik eksekutif maupun legislatif, sehingga dengan kondisi demikian mereka belum memahami dengan kehumasannya”. (Wawancara dengan Agus Effendi, SE tanggal 18 Maret 2013).

1. Media yang digunakan DPRD dalam Membangun *Media Relations*

Peneliti melihat bahwa Humas sekretariat DPRD ini lebih banyak condong memaksimalkan peran publisitas ketimbang memainkan fungsinya sebagmembina *media relations*. Sekalipun *media relations* berjalan, itu hanya bersifat ke dalam saja. Padahal selain mempublikasikan tentang pembangunan pemerintahan, Humas juga perlu menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

“Kendalanya kalau ada yang menyalurkan aspirasi disini, humas itu kurang efektif bekerja. Kurangnya itu komunikasi taruhlah misalnya ada yang menyalurkan aspirasi. Tentunya humas dulu yang berhadapan apa maksud dan tujuan, lalu menyampaikan kepada kami. Tentunya kan duduk persoalan harus kita ketahui lebih dulu. Disinilah fungsinya. Jadi bisa jawaban ke masyarakat itu tidak tambal sulam”.
(Wawancara dengan Agus Effendi, SE tanggal 18 Maret 2013).

Pembuktian tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian hasil kinerja yang dilakukan oleh Humas. Beberapa anggota legislatif melihat kinerja humas sebagai mediator baik secara internal maupun eksternal terlihat sangat buruk. Sadjji, S.Pd. yang merupakan ketua komisi B di DPRD Kabupaten Bantul kemudian berujar mengenai bagaimana peran tersebut tidak berjalan. Beliau bahkan mengeluarkan solusi untuk menangani hal tersebut.

“Ada satu problem kita. Problem itu perspektif publik terhadap DPRD. Publik anggap kita eksekutif. Peran kita peran penganggaran. Kita itu mendesain dan menampung aspirasi. Ini yang tidak dipahami oleh publik. Kita itu yang merencanakan anggaran, eksekutif yang menggunakan anggaran. Itu direncanakan dalam dua kali setahun”. “Kedua itu mengawasi, jadi bila aspirasi masuk, selebihnya itu kita menjadi informasi. Disini lagi kinerja kehumasan itu gagal. Mulai dari sosialisasi hingga publisitas juga gagal. Akhirnya peran ini diambil alih anggota dewan secara personal”. (Wawancara dengan Irwan ST tanggal 20 Maret 2013).

Fungsi Humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas menurut para anggota legislatif dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai.

Pernyataan diatas dikuatkan oleh salah satu anggota legislatif yang kembali berujar mengenai fungsi humas yang mengakibatkan anggota DPRD Kabupaten Bantul lebih mengupayakan kemampuan mediasi secara personal.

Media yang digunakan oleh Humas DPRD Kabupaten Bantul dalam membina *media relations* adalah :

1. Media Cetak
 - a. Surat Kabar (KR, Bernas, Sindo, Republika, Radaer Jogja, Tribun Jogja, Harian Jogja, dll)
 - b. Buletin (Biwara)
2. Media Elektronik
 - a. Radio (Persatuan Bantul, acara utak-atik)
 - b. Jogja TV (Gardu Projotamansari, Blusukan)
 - c. Tri Jaya FM
3. Media *Online*
 - a. Okezone.com
 - b. Vivanews.com

“Menurut saya jadi bila menilai DPRD yang muncul cuma personal bukan sebuah institusi. Ini kan indikator tim humas kita tidak berjalan”.(Wawancara dengan Sadji, S.Pd tanggal 20 Maret 2013).

Humas DPRD Kabupaten Bantul dalam membina *media relations* DPRD Kabupaten Bantul selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui berbagai media seperti melalui Radio Persatuan. Dalam kegiatan media dengan radio Persatuan meyelanggarakan acara interaktif dengan nama acara Utak-atik. Dalam acara tersebut narasumbernya selain dari kalangan anggota dewan juga berasal dari tokoh-tokoh masyarakat. Pembahasan tema acara utak-atik ini adalah seputar permasalahan masyarakat yang aktual. Acara ini dilaksanakan setiap hari Jum'at setiap minggu pertama dan minggu ketiga dan disiarkan *on air* pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Acara interaktif Gradu Projo tamansari yang disiarkan melalui Jogja TV merupakan andalan Humas DPRD Kabupaten Bantul. Acara yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 ini menghadirkan nara sumber tidak hanya dari kalangan anggota DPRD namun juga dari kalangan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. Acara ini lebih ditekankan berbagai kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh DPRD Bantul. Acara interaktif ini ternyata banyak diminati oleh masyarakat terbukti dengan interaktif secara langsung melalui tanya jawab melalui telepon maupun sms pada acara tersebut. Acara Gardu Projo tamansari ini awalnya ditayangkan setiap hari Kamis pukul 20.00 hingga pukul 21.30, namun terjadi perubahan jam tayang sejak tahun 2009 menjadi setiap hari senin pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.30.

Selain itu media yang digunakan Humas DPRD Kabupaten Bantul juga menerbitkan Buletin Biwara. Buletin ini berisi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD juga berisi pendapat dan opini dari kalangan anggota DPRD maupun masyarakat. Untuk sementara Buletin ini hanya beredar di kalangan pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Hingga saat ini buletin Biwara sudah memasuki tahun ke tujuh dan sudah merupakan andalan Bagian Humas DPRD dalam mensosialisasikan kegiatan kedewanan melalui media cetak intern.

Peran *media relation* DPRD Kabupaten Bantul begitu sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan akuntabel untuk itu Bagian Humas DPRD Bantul tidak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Untuk itu pula, Kepala Bagian Humas DPRD,

Kwintarto, berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Bagian Humas saat ini sedang menggodok dan mereformasi sistem kehumasan DPRD dengan memanfaatkan Sistem Informasi Teknologi (IT). Dengan layanan IT ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui layanan IT yang sudah dibuat, seperti *website*, *facebook*, dan media sosial lainnya.

Penerapan *media relations* dengan sistem IT ini dilakukan seperti yang diterapkan negara-negara berkembang, untuk memaksimalkan penyampaian atau penyaluran aspirasi masyarakat lewat sistem IT ke para anggota dewan.

“Insya Allah ini adalah rencana jangka panjang saya di Humas DPRD Kabupaten Bantul dengan sistem IT. Olehnya itu, saya harap sistem IT ini kiranya diapresiasi oleh pihak terkait agar niat yang baik ini dapat terealisasi secepat mungkin untuk mendukung solidnya kinerja kita”.
(Wawancara dengan Kwintarto Heru Prabowo 18 Maret 2013)

Website ini sebagai ruang penyampaian aspirasi dan ruang tanya jawab antara masyarakat, dan wakil rakyatnya di DPRD Bantul. Kemudian, memberdayakan blog di internet, *facebook*, dan *Twitter* untuk menyerap semua aspirasi masyarakat lewat dunia informasi teknologi yang modern. Namun, selain mengembangkan hal tersebut, Bagian Humas DPRD tidak mengesampingkan sistem manual dengan menggarap kotak saran DPRD dengan merambah 17 kecamatan di Kabupaten Bantul.

Masyarakat nanti tidak perlu lagi datang untuk melakukan demo di Kantor DPRD, cukup membuka *website* atau blog yang akan disediakan bagi masyarakat nanti. Di *website* itu masyarakat lebih nyaman menuangkan apa keluhannya terkait kebijakan DPRD kemudian langsung diberikan jawaban oleh anggota dewan atau bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Aktivitas DPRD dalam membangun Media Relations

Ada sejumlah faktor pendukung dan penghambat maksimalnya kinerja Humas. Salah satunya adalah para pembawa aspirasi yang kadang kurang mengetahui aturan di kantor DPRD Kabupaten Bantul.

“Pembawa aspirasi itu tidak mengetahui. Nanti dari humas itu ada yang bertugas membawa mereka ketemu dengan anggota dewan”. “Kadang ada dari pembawa aspirasi yang cukup mengerti mereka, itu yang mendukung”. (Wawancara dengan . Noviyanti, SST tanggal 18 Maret 2013).

a. Faktor Pendukung

Persoalan penyalahan pembawa aspirasi ini tidak cukup beralasan, setidaknya humas perlu memberikan pemahaman yang berulang-ulang ketimbang menyalahkan para pembawa aspirasi. Setidaknya dari situ perannya lebih bisa dikedepankan.

Beberapa anggota legislatif juga mengeluhkan masyarakat cenderung lebih menyampaikan aspirasinya di luar. Ini membuktikan bahwa aktivitas humas yang belum bisa memancing masyarakat untuk langsung menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD.

“Kadang juga masyarakat hanya berbicara di luar. Tidak ada hambatan ketika sudah masuk di DPR selanjutnya itu disampaikan ke Bupati”. (Wawancara dengan Amir Syarifuddin 20Maret 2013).

Staf humas maupun sekretariat DPRD tidak menyebutkan mengenai faktor pendukung bahkan fasilitas juga cenderung untuk dianggap sebagai faktor penghambat kinerja Humas.

Namun dengan begitu Kasubag humas dengan ruangan yang sempit tetap berusaha melakukan tugasnya”. (Wawancara dengan Sekretaris DPRD). Terkait faktor pendukung dan penghambat kinerja kehumasan di kantor ini maka peneliti menyimpulkan faktor pendukung tersebut antara lain.

1. Fasilitas Memadai. Observasi peneliti menghasilkan ketidakbenaran ujaran yang mengatakan bahwa fasilitas belum memadai. Anggaran yang ada dan ketersediaan ruangan sebenarnya bisa dikatakan sangat mendukung kinerja kehumasan.
2. Pembagian kinerja yang sangat spesifik membuat kinerja kehumasan seharusnya lebih mudah. Satu staf tidak perlu melakukan banyak pekerjaan. Dalam artian satu urusan akan bisa diselesaikan dengan maksimal dan cepat.
3. Teknologi Komunikasi. Jaringan komunikasi dan ketersediaan teknologi sebenarnya adalah cara untuk senantiasa mengupdate informasi setiap waktu. Seorang staf Humas tidak memiliki lagi alasan untuk kekurangan informasi.

Program pengembangan humas dengan faktor pendukung diatas setidaknya sudah harus proaktif dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat, baik di bidang teknologi, informasi, ekonomi, hukum maupun politik.

Menangkat kembali tujuan sentral humas yang hendak dicapai secara strategis, tidak hanya berfungsi sebagai “peta” yang

menunjukkan arah, melainkan juga menunjukkan “bagaimana” operasional konsep dan strategi komunikasinya. Strategi dalam komunikasi humas merupakan perpaduan antara *communication planning* (perencanaan komunikasi) dan *management communication* (komunikasi manajemen). Tujuan sentral Humas DPRD Kabupaten Bantul adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) atau tujuan untuk menciptakan suatu citra dan reputasi positif lembaga.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat kinerja Humas beberapa diantara staf ada yang mengeluhkan mengenai jadwal kegiatan anggota DPRD yang cenderung bertabrakan dengan kegiatan yang lain, seperti yang diungkapkan staf Humas Erviandi :

“Kadang anggota jadwal dewan bertabrakan dengan jadwal yang sudah diagendakan sebelumnya oleh humas. Namun kami memilih skala prioritas dan kepentingan acaranya” (Wawancara dengan Erviandi, tanggal 23 Maret 2013).

Memang ada kecenderungan minimnya budaya mencari informasi yang peneliti dapatkan. Bahkan ada yang menganggap biasa saja mengenai pemberitaan yang menganggap Humas DPRD tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut adalah faktor penghambat yang berhasil peneliti simpulkan.

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pegawai.
Penelusuran peneliti menemukan anggota legislatif yang mengeluhkan kinerja Humas namun ada pula yang

menganggap kinerja Humas berhasil. Tidak berimbangnya kualitas staf humas menjadi salah satu faktor penghambat yang disimpulkan oleh peneliti.

Seorang pejabat humas seharusnya dapat berkomunikasi dengan humas seperti di DPRD Kabupaten Bantul pun harus mampu menggunakan media secara efektif, baik itu media massa maupun media non-massa.

2. Manajemen Kelembagaan Humas. Manajemen kelembagaan yang sudah usang. Ada baiknya untuk diperbaharui sesuai dengan konteks zaman. Para penyampai aspirasi saat ini sudah memiliki cara yang beragam. Oleh karena itu Humas juga perlu melakukan adaptasi.

“Sekarang soal tata cara menyampaikan aspirasi tidak bisa diintervensi, karena karakter masyarakat berbeda dalam menyampaikan aspirasi, tapi kita juga punya harapan karena disini institusi pemerintahan. Seperti itu tadi, berhubungan dulu dengan humas, protokoler dan bagian umum”. (Wawancara dengan Agus Effendi, SE tanggal 20 Maret 2013).

3. Perlunya perbaikan baik dari segi struktur (SDM) maupun sistem (mnajemen organisasi) membuat kiranya diperlukan adanya perubahan dalam iklim birokrasi. Revitalisasi peran Humas di DPRD Kabupaten Bantul mutlak diperlukan, mengingat ke depan bahkan kini peran humas sangat strategis dalam kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

Peran dan fungsi kehumasan perlu direvitalisasi agar dalam memberikan berita bisa cermat dan akurat. Fungsi humas bukan sekadar memberi informasi akan tetapi image yang dikeluarkan memang benar-benar untuk masyarakat luas.

“Sebenarnya bila ingin diperbaiki harus ada kebijakan pemerintah Kabupaten dalam reformasi birokrasi. Masyarakat biasa langsung masuk, karena tidak ada sistem. Dan memang kembali kepada SDMnya. Latar belakang pendidikan bukan berarti yang mempengaruhi semuanya. Kultur birokrasi kita yang lemah. Perlu juga ada remunerasi. Perlu ada *reward* dan *punishment*”. (Wawancara dengan Sadji, S.Pd. tanggal 18 Maret 2013).

Berdasarkan alasan tersebut, Humas sebagai sebuah bagian khusus yang sedang berkembang perlu membentuk divisi atau bagian khusus yang menjalankan aktivitas kehumasan agar pelaksanaan aktivitas humas dapat berjalan dengan lancar dan tidak menghambat aktivitas kerja publik intern. Sebenarnya dari hasil pengamatan peneliti hal ini sudah dilakukan. Kembali lagi pada persoalan SDM yang menghambat kondisi tersebut untuk berjalan. Selain itu, sebenarnya humas mempunyai peranan penting dalam manajemen instansi.

Humas juga mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran aktivitas kerja dalam instansi. Dengan diperhatikannya kebutuhan atau keinginan staf, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para staf dan aktivitas kerja staf dapat lebih lancar pelaksanaannya tanpa adanya hambatan yang muncul akibat tidak efektifnya aktivitas humas bagi publik intern. Tak hanya itu saja, Humas juga berperan sebagai mitra

pencitraan *good goverment* dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai.

Sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala, dari masalah struktur dan organisasi humas, kultur/budaya kerja praktisi atau pejabat humas yang masih kurang strategis. Setidaknya ada empat masalah utama yang harus segera dibenahi dan direvitalisasi oleh aparat humas memasuki era keterbukaan informasi publik, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan humas, infrastruktur pendukung kinerja dan sinergitas antar pemerintah serta satuan kerja.

C. Analisis Data

Pada suatu instansi/organisasi, terdapat pengaruh yang cukup besar dari pihak internal maupun eksternal. Agar dapat terjalin hubungan baik antara humas DPRD Kabupaten Bantul dan *media relations*, maupun sebaliknya, bisa berjalan harmonis maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi organisasi dan tujuan-tujuan yang telah dibuatnya dapat tercapai. Tidak hanya pengaruh pihak internal saja, tetapi pihak eksternal juga mempunyai pengaruh yang besar, karena apabila suatu instansi/organisasi dapat membina dan memelihara sikap budi yang baik untuk instansi/organisasi di satu pihak dengan publik di lain pihak, dengan menggunakan komunikasi yang harmonis maka timbal balik yang akan didapat adalah citra positif yang akan dinilai oleh masyarakat.

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti merumuskan bahwa publikasi dan *media relations* merupakan sebuah bagian penting, agar komunikasi yang dilancarkan oleh humas DPRD Kabupaten Bantul sesuai dengan sasaran pihak internal bisa berjalan dengan baik.

Jenis media internal Humas DPRD Kabupaten Bantul yang digunakan majalah bulanan dan mingguan, berbentuk *company profile*, *annual report*, dan yang lainnya untuk tujuan *informatif*, selain itu juga dapat menggunakan tabloid dan Bulletin dan lain-lainnya, salah satunya adalah media cetak Bulletin Biwara, karena dapat dikaji berulang-ulang dan disimpan sebagai dokumentasi yang isinya kebanyakan adalah artikel-artikel, *feature*, dan ilustrasi, karyawan, sebagai *public internal* diharap mengetahui semua tentang kegiatan dan segala aktivitasnya yang telah dikerjakan baik secara internal maupun eksternal oleh Pemkab Bantul.

Media sebagai salah satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh Humas Pemkab Bantul untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mampu meningkatkan citra, seperti jurnal organisasi (*house jurnal*) di mana istilah ini memiliki bermacam-macam pemberitaan, mulai dari jurnal internal, eksternal, dan Bulletin, (Jefkins,1992:62). Media tersebut dipergunakan oleh Humas DPRD untuk keperluan publikasi yang ditujukan pada kalangan terbatas yang hanya dibagikan kepada karyawan, para pimpinan, para anggota dewan yang terkait, seperti yang disebutkan oleh Frank Jefkins ada beberapa jenis pekerjaan yang harus dilakukan bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul salah satunya adalah penyunting atau memproduksi majalah internal serta mengelola berbagai bentuk komunikasi internal lainnya seperti video, presentasi slide, majalah dinding dan sebagainya, media

komunikasi yang dapat digunakan banyak jenisnya, karena untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu gabungan dari beberapa media tergantung pada tujuan yang akan dicapai.

Dalam membina hubungan baik dengan *media relations* Humas DPRD Bantul bertugas juga menyampaikan kepada informasi kepada wartawan. Humas selain melakukan penginformasian ulang terhadap pemberitaan yang ada di sekitar publik, maka informasi tersebut setelah mendapat tanggapan dari Anggota Dewan sebagai pembicara maka tugas Humas selanjutnya adalah menyampaikan informasi yang telah didapat dari Anggota Dewan sebagai pembicara, disampaikan kepada wartawan.

Setelah humas berkonsultasi kepada Anggota Dewan yang telah menyampaikan keputusan, maka humas menginformasikan pesan atau hasil konsultasi yang telah didapat dari Anggota Dewan, diinformasikan kepada wartawan untuk dijadikan bahan didalam meliput suatu berita untuk dikonsumsi kepada publik.

Humas DPRD Kabupaten dalam membina dan menyelenggarakan *media relations* bertugas menyampaikan pesan atau informasi dari Anggota Dewan. Bagian humas bertindak menyimak pembicara yakni anggota Dewan dan publik, lalu humas melakukan pengoreksian atas pesan atau informasi yang didengar, dan ditinjau kembali yang nantinya akan menjadi bahan laporan kembali untuk disampaikan kepada Anggota Dewan.

Humas DPRD dalam menjalankan aktifitas *media relations* juga mengikuti rapat dan peninjauan kembali dari Dewan, seperti dimaksudkan di atas adalah,

humas yang nantinya setelah mengikuti rapat peninjauan dari Dewan, maka setelah hal ini dilakukan tugas humas adalah menyampaikannya kepada bagian-bagian lainnya, seperti bagian persidangan dan publikasi, untuk persiapan dijadikan agenda harian Anggota Dewan. Aktivitas Humas DPRD Kabupaten Bantul dalam beberapa bentuk kegiatannya seperti :

a. *Media Center*

Menurut Rusady Ruslan (2002 : 178) Humas harus mampu membangun hubungan pers yang lebih serasi (*good press relationship*) dan diharapkan akan tercipta suatu hubungan saling menguntungkan bagi kedua pihak (mutual symbiosis). Media center DPRD Kabupaten yang selama ini sudah dilakukan dan menjadi agenda rutin adalah *gathering, press release, media kits, cyber public relations*, kliping media, konferensi pers, press room dan komunitas pers.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa aktivitas media center yang selama ini dilakukan mempengaruhi terbentuknya citra DPRD sebagai lembaga yang transparan di masyarakat maupun *stakeholder*. Bagian Humas mengembangkan kerjasama dengan pihak media. Selain itu, Humas juga memberikan fasilitas peralatan yang mendukung kerja media maupun stafnya sendiri. Hubungan tersebut sebagai wujud hubungan personal antara Humas dengan media telah berhasil terjalin.

b. *Press Conference*

Press Conference yang dilakukan oleh Humas DPRD Kabupaten Bantul dalam memberi informasi, misalnya, mengabarkan terjadinya perubahan

Anggaran dalam APBD. Mengklarifikasi, misalnya, memberi informasi hal yang benar atas suatu pemberitaan yang dinilai tidak benar dan merugikan termasuk yang belum beredar di media. Dalam *Press Conference* Humas DPRD tidak melakukan pencitraan, misalnya, memberitakan kegiatan atau aktivitas perusahaan, lembaga dalam kegiatan sosial sehingga diketahui publik dan positif di mata publik.

Press conference yang dilaksanakan bagian Humas DPRD biasanya dilakukan menjelang, menghadapi ataupun setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. Karena biasanya materi yang dibahas adalah sebuah peristiwa penting dan besar, maka konferensi pers ini dalam penyelenggaraannya bisa berasal dari inisiatif pemimpin rapat perusahaan tersebut, bisa juga atas permintaan wartawan yang menginginkan informasi lebih lengkap tentang suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Press conference tidak dianjurkan bagi kegiatan atau peristiwa yang terlampau sederhana. Tetapi, konferensi pers sebaiknya dilakukan pada peristiwa besar dan penting saja. Seperti halnya penyebaran siaran pers, jumpa pers ini pun bisa dilakukan menjelang maupun setelah kegiatan berlangsung (Abdullah, 2000: 86).

Dilihat dari pelaksanaannya *press conference* yang dilakukan bagian Humas DPRD sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas. Namun memang belum sempurna dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Kabag Humas untuk memperbaikinya setelah

melakukan konsultasi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bantul tentunya.

c. *Press Release*

Penggunaan siaran pers umum di bidang *public relations* (PR) atau kehumasan biasanya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian media yang menguntungkan untuk DPRD atau memberikan publisitas untuk produk atau peristiwa kegiatan DPRD. Siaran pers menyediakan wartawan dengan subsidi informasi yang berisi dasar-dasar yang diperlukan untuk mengembangkan berita.

Ali (2003:98) secara lebih jelas lagi mendefinisikan *press release* sebagai sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya, yang kemudian dikirimkan kepada media untuk dapat disiarkan melalui media tersebut. Media yang dimaksud dalam kegiatan *press release* adalah media massa yang meliputi media massa cetak, yaitu surat kabar dan majalah, serta media massa noncetak yang meliputi TV, radio dan film. Kepada redaksi media-media massa tersebut *press release* dikirim oleh humas yang mewakili suatu organisasi, untuk dapat dimuat di dalamnya.

Menurut Effendy (1999:129), upaya penyebaran *press release* ke berbagai media massa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama dengan cara mengirim langsung *press release* yang telah dibuat ke redaksi media massa yang dituju, selanjutnya redaksi media massa menyusun *press release* tersebut sesuai dengan aturan redaksional media massa bersangkutan, dan kemudian *press release* tersebut dipublikasikan.

Kedua, dapat pula dilakukan dengan cara menyertakan atau melampirkan lembaran *press release* dalam kegiatan konferensi pers. Pada kegiatan konferensi pers, pihak organisasi yang diwakili oleh humas membagikan lembaran *press release* kepada wartawan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini *press release* digunakan untuk melengkapi atau mendukung kegiatan konferensi pers.

Melihat apa yang telah dilaksanakan oleh bagian Humas DPRD Kabupaten Bantul maupun anggota DPRD dalam melakukan *press release* sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang ada dalam teori. Namun memang dalam pelaksanaannya seringkali justru media atau jurnalis yang meminta berita ataupun *release* kepada kalangan anggota dewan, pimpinan dewan atau alat kelengkapan DPRD lainnya. Jika hal itu yang terjadi umumnya hanya sebatas pernyataan pribadi bukan pernyataan sikap yang dimaksudkan dalam *press release* yang dimaksud.

d. *Press Tour*

Tujuan dari kegiatan *press tour* adalah untuk memperoleh publikasi seluas mungkin, untuk mendapatkan tempat pemberitaan di media massa dan untuk mewujudkan hubungan yang stabil dengan pers (Ruslan 2003: 187-194).

Aktivitas *press tour* Humas DPRD Bantul dengan mengajak wartawan Bantul ke salah satu Obyek dilakukan dengan sangat terencana bersama staf dan pimpinan Sekretariat Dewan bertujuan menjaga hubungan baik yang selama ini sudah terjalin antara jurnalis yang meliput kegiatan DPRD Kabupaten Bantul, menjalin tali silaturahmi dan memberitakan kegiatan-

kegiatan DPRD secara transparan dan akuntabel dalam berbagai kegiatan DPRD.

Pelaksanaan kegiatan *press tour* dapat memperlihatkan atau mewujudkan partisipasi aktif para wartawan seperti menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, *press tour* juga dapat memotivasi wartawan dalam melengkapi berita yang diterima dari humas dan menyebarkan kebijaksanaan perusahaan yang juga turut membantu pihak pers untuk pengisian kolom-kolomnya.

Menurut Rachmadi dalam bukunya *Public Relations* dalam Teori dan Praktek yaitu suatu wahana yang diadakan oleh suatu instansi yang bersangkutan yang membuka kesempatan untuk penyebaran informasi yang menyangkut berbagai hal sekaligus (Rachmadi, 1996 : 56). Kegiatan *press tour* ini memang tidak murah, tetapi manfaat dari sisi kehumasan bisa jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, karena besarnya biaya ini, biasanya pihak humas hanya mengikutsertakan beberapa orang wartawan saja.

Selain bermanfaat dari sisi humas, *press tour* ini amat potensial menjadi *media marketing public relations* (MPR). Dengan laporan jurnalistik yang dibuat oleh wartawan itu, selain bermanfaat sebagai kegiatan kehumasan, juga sebagai ajang publikasi anggota Dewan.

Humas DPRD merupakan corong dari DPRD Kabupaten Bantul, maka bagian Humas termasuk dalam bagian kesekretariatan yang berfungsi sebagai fasilitator kegiatan para anggota Dewan dan pembinaan terhadap berbagai media sebagai patner dalam menginformasikan kegiatan DPRD kepada publik. Bagian Humas dan

Hukum mempunyai peranan memfasilitasi Dewan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Termasuk memberikan atau menyampaikan informasi kegiatan Dewan melalui undangan yang menggunakan kemajuan teknologi yaitu dengan menggunakan teknologi melalui SMS. SMS merupakan program yang dibentuk untuk melancarkan dalam menyampaikan informasi kepada Dewan.

Bagian Humas sebagai fasilitator komunikasi, bagian Humas bertindak sebagai komunikator atau mediator melalui media-media yang ada seperti media cetak dan media elektronik seperti TV dan radio. Bagian Humas dan Hukum memiliki keinginan untuk mempermudah dan mempercepat informasi atau menyampaikan pesan kegiatan kepada publik sebelum surat undangan secara resmi sampai kepada Dewan. Dengan begitu Humas dapat memahami apa yang diinginkan Dewan dan wartawan yaitu mendapatkan informasi kegiatan dengan cepat Menurut Marhaeni Fajar dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek menyebutkan,

“Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi adalah sebagai pendengar yang peka dan *broker* (perantara) komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara (*liaison*), interpreter, dan mediator antara organisasi dan publiknya. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama”. (Fajar, 2009:51).

Humas menjadi perantara untuk Dewan dalam menyampaikan kegiatan kepada Dewan. Setiap kegiatan yang akan dilakukan Dewan secara otomatis Humas mengirimkan pesan dan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dewan.

Selain menjadi perantara keinginan Dewan, Humas pun menjalankan kebijakan Dewan melalui media cetak dan media-media yang ada yaitu hanya melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan Dewan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Humas dan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan menjadi suatu keharusan Humas untuk menginformasikan kegiatan dewan disetiap kegiatan Dewan yang akan dilakukan.

Dengan begitu Humas dan dan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan Dewan dan menjalankan keinginan, kebijakan dan harapan Dewan ada kaitannya dengan yang dijelaskan oleh Dozier & Broom dalam buku Rosady Ruslan yang berjudul Manajemen Public Relations & Media Komunikasi yaitu.

“Fasilitator Komunikasi (*communication fasilitator*), dalam hal ini bagian humas bertindak sebagai komunikator untuk membantu anggota DPRD dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Dipihak lain, *Public Relations* juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak”. (Ruslan, 2008:20)

Untuk melancarkan informasi kepada publik, bagian Humas dan Hukum mensosialisasikan kegiatan ini melalui rapat Badan Musyawarah dan Humas meminta nomor telepon Dewan supaya setiap ada kegiatan Humas mengirimkan pesan kepada nomor yang bersangkutan. Pesan yang disampaikan dalam SMS kepada Dewan bersifat formal atau resmi kata-kata yang digunakan sopan atau lebih

mengarah pada baku dan disampaikan secara singkat dan tepat dan mengarah kepada undangan. Pesan yang biasanya disampaikan berupa undangan rapat, pemberitahuan, kabar duka, kunjungan kerja dan pesan yang lain yang sifatnya informasi yang harus disampaikan. Selain itu Humas juga mengirimkan pesan ralat dari pesan yang sebelumnya dikirimkan. Dalam satu hari pun Humas mengirimkan pesan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan Dewan semakin banyak kegiatan Dewan dalam satu hari maka pesan yang dikirimkan pun semakin banyak.

Kegiatan humas sebagai PR DPRD seringkali berkaitan dengan pemecahan suatu masalah. Humas DPRD harus dapat mengetahui mengapa suatu lembaga begitu sulit memperoleh staf yang dibutuhkannya. Itu mungkin saja terjadi karena adanya sikap negatif di kalangan masyarakat terhadap DPRD. Humas sebagai PR DPRD yang baik adalah humas yang mampu mengubah sikap-sikap negatif ke positif dengan cara menguraikan apa yang menjadi kenyataan sebenarnya, tanpa bermaksud memutarbalikan atau memanipulasi kenyataan.

Sistem komunikasi dalam Sekretariat secara teknis komunikasi berjalan dari bawahan kepada atasan dimana pada saat perolehan informasi untuk disampaikan. Informasi diperoleh melalui Badan Musyawarah yang membahas agenda penjadwalan rapat Dewan setelah ditemukan hasil penjadwalan maka penjadwalan tersebut dibuat oleh Sub Bagian Persidangan setelah dibuat surat diserahkan kepada Pimpinan Dewan untuk meminta persetujuan Pimpinan Dewan. Sistem komunikasi pun terjadi dari atasan kepada bawahan pada saat surat undangan dari Pimpinan Dewan diserahkan kembali kepada Bagian Persidangan.

Sistem komunikasi terjadi dalam satu tingkatan (level) atau dengan kata lain antar bagian yang berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul disaat surat undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dewan diserahkan oleh Bagian Persidangan kepada Bagian Umum. Bagian Umum menyerahkan kembali pada Bagian Persidangan dan oleh bagian Persidangan diberikan kepada seluruh bagian yang berada di Sekretariat DPRD termasuk Bagian Humas dan Hukum oleh Bagian Humas disebarkan undangan tersebut melalui teknologi informasi maupun surat undangan dalam bentuk cetak kepada anggota dewan.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa strategi *media relations* yang diterapkan oleh Humas DPRD Kabupaten Bantul ini mengacu pada teori yang diterapkan oleh Yosali Iriantara bahwa strategi *Media Relations* adalah meliputi mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan. (2005:80-97). Dengan begitu, Humas DPRD Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan hubungan baik dibidang *media relations* dengan cara mengundang media dalam serangkaian kegiatan perusahaan seperti *press conference*, melakukan pemasangan iklan dan rangkaian kerjasama lainnya yang bersifat mutualisme.

Berkaitan dengan fungsi dan tugas seorang *media relations officer*, melainkan penekanan pada kompetensi seorang humas DPRD, selain harus memiliki kemampuan teknis juga harus menguasai dan mampu membuat sebuah analisa akan perkembangan opini publik. Kembali lagi kepada definisi *media relations*, secara teori seperti dalam *glosarium*, *media relations* adalah berhubungan dengan para wartawan dalam upaya untuk membina hubungan yang baik dengan media siaran, cetak, dan *online*.

Dari sini Humas DPRD bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan PR dalam membina hubungan baik dengan media massa. Melihat tugas *media relations* tersebut jelas bahwasannya peran seorang *media relations* dalam menyukseskan program dan perencanaan strategi PR menjadi sangat krusial. Secara sederhana dapat diilustrasikan bahwasanya menjalin hubungan baik dengan media ini seperti halnya kita menjalin hubungan dengan pasangan. Sangat kompleks dan banyak hal yang musti diperhatikan. Dengan demikian tak ada salahnya organisasi mempercayakan hal ini kepada orang yang memang memiliki selain *network* ke media juga kedekatan hubungan dengan masing-masing media termasuk memahami secara baik seluk-beluk media massa.

Bentuk kegiatan kehumasan yang dapat dilakukan dengan menggunakan media ini diantaranya adalah publikasi dan menciptakan berita (*media relations*). Dalam kegiatan publikasi, seorang humas DPRD biasanya menempuh jalan memanfaatkan media internet untuk menjalin hubungan baik dengan wartawan. Apabila Humas ingin segera mempublikasikan *press release* yang dituliskan, maka Humas dapat mengirimnya melalui *e-mail* tanpa harus memakan waktu banyak untuk menemui wartawan.